

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai pendahuluan yang merupakan bagian awal dari suatu penelitian. Bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan timbulnya alasan-alasan masalah yang diteliti, rumusan masalah yang menjelaskan mengenai batasan inti permasalahan yang akan dipecahkan, tujuan dan manfaat penelitian yang dirumuskan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, serta definisi operasional yang digunakan untuk membatasi penelitian agar tidak menimbulkan kesalahpahaman persepsi.

A. Latar Belakang

Permasalahan permukiman yang dihadapi kota besar semakin kompleks. Tingginya tingkat kelahiran dan migrasi penduduk yang terbentur pada kenyataan bahwa lahan di perkotaan semakin terbatas dan nilai lahan yang semakin meningkat serta mayoritas penduduk dari tingkat ekonomi rendah, menimbulkan permukiman-permukiman padat di kawasan yang dianggap strategis yaitu kawasan pusat kota, industri dan perguruan tinggi, sehingga terbentuklah permukiman kumuh. Menurut Widjanarko (2008: 1) “saat ini terdapat 17 juta jiwa penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan berada dibawah garis kemiskinan yang menempati permukiman kumuh di area seluas 40.000 hektar di 10.000 lokasi”.

Dalam Rapat Kerja Nasional NUSSP (2007) menghasilkan keputusan :

Pemerintah Indonesia tahun 2007 menganggarkan dana sebesar Rp165 miliar yang berasal dari APBN dan APBD untuk penanganan

permukiman kumuh perkotaan melalui program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project* (NUSSP). Dana tersebut akan digunakan di 397 Kelurahan/Desa di seluruh Indonesia dengan luasan wilayah kumuh yang akan ditangani 3.960 hektar.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada dikawasan permukiman kumuh antara lain mencakup tingkat pendapatan rendah, norma sosial yang longgar, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya yang antara lain tampak dari sikap dan perilaku yang apatis. Kondisi tersebut sering juga mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk, sumber pencemaran, sumber penyebaran penyakit dan perilaku menyimpang, yang berdampak pada kehidupan kota keseluruhannya. Hali ini pula di tegaskan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung 2010 yaitu : Realitas di lapangan saat ini menunjukkan bahwa umumnya kota besar di Indonesia termasuk Kota Bandung sudah makin terbebani oleh pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk terutama karena disebabkan oleh urbanisasi dan migrasi penduduk antar daerah. Implikasi yang sangat nyata dengan adanya pertumbuhan penduduk ini adalah semakin meningkatnya kebutuhan pelayanan akan sarana dan prasarana permukiman kota, termasuk kebutuhan perumahan yang layak bagi penduduknya. Dengan semakin terbatasnya lahan kota disertai dengan keterbatasan kemampuan Pemerintah Kota dalam menyediakan prasarana dan sarana permukiman yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas penduduk sehari-hari, maka konsekuensi logis yang umumnya terjadi pada permukiman perkotaan adalah munculnya kawasan padat dan kumuh (perumahan tidak layak huni) dan semakin tertekannya kondisi sosial ekonomi penduduk perkotaan yang umumnya masih didominasi oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menengah.

Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan permukiman, sedang kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan pengelola kota akan menentukan kualitas permukiman yang terwujud. Menurut Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung 2010 menyebutkan bahwa sebagai ibukota Propinsi Jawa Barat dengan peran dan fungsinya sebagai kota pusat pemerintahan, jasa, pendidikan, perdagangan, perindustrian, pariwisata dan lain sebagainya, maka besarnya jumlah penduduk Kota Bandung dapat dikatakan wajar sejauh kota masih mampu melayani kebutuhan masyarakatnya dan menunjang semua aktivitas penduduknya. Keadaan ini tidak bisa dibiarkan terus menerus dan diperlukan terobosan yang dapat memperbaiki kondisi permukiman kumuh ini menjadi permukiman yang layak huni dan menumbuhkan kualitas hidup dan lingkungan hidup yang lebih baik bagi para penghuninya.

Menurut Fisher (1984: 45), Individu tidaklah menciptakan makna-makna dari apa yang diinderakan karena sesungguhnya makna itu telah terkandung dalam stimulus itu sendiri dan tersedia untuk organisme yang siap menyerapnya. Ia berpendapat bahwa persepsi terjadi secara spontan dan langsung. Jadi bersifat *holistic*, Spontanitas itu terjadi karena organisme selalu menjajaki lingkungannya dan dalam penjajakannya itu ia dilibatkan setiap objek yang ada di lingkungannya dan setiap objek menonjolkan sifat-sifatnya yang khas dengan sifat-sifat yang khas untuk organisme bersangkutan. Persepsi merupakan hal yang mempengaruhi sikap, dan sikap akan menentukan perilaku. Dalam hubungan tersebut pemerintah perlu mengakui potensi masyarakat. Bila masyarakat aktif, pemerintah bertindak sebagai fasilitator sedangkan bila masyarakat tidak aktif, pemerintah

mengupayakan agar masyarakat dapat berpartisipasi. Daerah kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia. Menurut data dari BPS Jawa Barat (2009) kota Bandung merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah 16.729,65 Ha dengan jumlah penduduk berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Daerah (Susesda) pada Tahun 2009 mencapai 2.374.198 jiwa (penduduk laki-laki 1.210.164 jiwa dan perempuan 1.164.034 jiwa). Rata-rata kepadatan penduduk kota Bandung 14.190,41 jiwa/km² dengan Laju Pertumbuhan penduduk (LPP) sebesar 1,90%.

Menurut BPS Kota Bandung, Di Kota Bandung, permukiman dan perumahan penduduk sangat padat seperti di kawasan Cicadas, Kiaracondong, Padasuka, Astana Anyar, Cibuntu, Ciroyom, Jamika, Tamansari, Sadang Serang, Binong dan masih banyak kawasan lainnya, merupakan potret kota besar sebagai akibat dari padatnya jumlah penduduk dengan segala kompleksitas permasalahan yang ada di dalamnya. Di kawasan permukiman tersebut, terdapat kantong-kantong permukiman kumuh yang umumnya dihuni oleh masyarakat pendatang hidup dari peluang yang mereka ciptakan sendiri dalam sektor informal. Hunian yang mereka bangun semi permanen dan non permanen dan menempati lahan secara ilegal sehingga tidak terjangkau dan mendapat dukungan sarana dan prasarana permukiman yang memadai. Akibatnya kondisi permukiman mereka cenderung kurang tertata dengan baik sehingga tidak memenuhi persyaratan yang layak sebagai tempat tinggal.

Disebutkan juga oleh Data Base Distarcip 2010 mengenai telaahan tentang permukiman kumuh pada umumnya mencakup tiga segi, pertama kondisi

fisiknya, kedua kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim di permukiman tersebut, dan ketiga dampak oleh kondisi tersebut. Kondisi fisik antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh antara lain tingkat pendapatan rendah, penduduknya bekerja di sektor non formal, norma sosial yang longgar, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya tampak dari sikap dan perilaku yang apatis. Kondisi tersebut sering juga mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk, sumber pencemaran/penyebaran penyakit dan perilaku menyimpang, yang berdampak pada kehidupan kota keseluruhannya.

Melihat gambaran di atas, menurut Distarcip 2010 : Dalam upaya penanganan permukiman kumuh sangat penting dilakukan pemberdayaan potensi masyarakat setempat untuk turut serta melakukan pembenahan lingkungannya serta sekaligus meningkatkan usaha ekonomi mereka yang selama ini bergerak di sektor informal. Dengan ciri khas potensi masing-masing kawasan, masyarakat akan dapat berdaya sehingga dapat memelihara lingkungannya secara berkelanjutan.

Berdasarkan data dari BPS Kota Bandung (2009) pada Tahun 2004 jumlah kepadatan penduduk di Kota Bandung adalah 13.346 jiwa/km². Kemudian pada Tahun 2005 sampai dengan 2008 senantiasa mengalami peningkatan yang signifikan. Pada Tahun 2005 jumlah kepadatan penduduk 13.505 jiwa/km², pada

Tahun 2006 jumlah kepadatan penduduk 13.729,74 jiwa/km², pada Tahun 2007 jumlah kepadatan penduduk 13.927,48 jiwa/km², kemudian pada Tahun 2008 menjadi 14.192 jiwa/km². Hal ini menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah kepadatan penduduk di Kota Bandung setiap tahunnya, dengan kata lain bertambah pula kebutuhan pemukiman yang harus disediakan di Kota Bandung.

Menurut Data Base Perumahan dan Permukiman Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung 2010 menyebutkan bahwa jumlah bangunan yang didiami atau menjadi tempat tinggal penduduk terdiri dari bangunan permanen sebanyak 466.778 bangunan (71,40%), bangunan semi permanen sebanyak 139.977 bangunan (21,41%) dan bangunan tidak permanen sebanyak 47.022 bangunan (7,19%). Bangunan yang ditempati oleh penduduk Kota Bandung baik yang ditempati khusus hanya untuk tempat tinggal maupun bangunan yang ditempati sebagai tempat tinggal maupun usaha bangunan campuran) dibangun umumnya berupa bangunan swadaya dan sisanya dibangun oleh developer maupun kontraktor.

Bangunan rumah swadaya yang dihitung dari total bangunan yang didiami penduduk dikurangi dengan jumlah rumah formal/yang dibangun oleh developer dan kontraktor adalah sebanyak 526.154 bangunan swadaya atau sekitar 80,47%. Bangunan rumah formal adalah bangunan rumah yang dibangun oleh pengembang ataupun oleh kontraktor dapat meliputi bangunan yang dibangun oleh Perumnas sebanyak 15.847 bangunan, developer yang tergabung dalam REI sebanyak 120.364 bangunan. Bangunan yang dibangun REI meliputi bangunan RSH (Rumah Sederhana Sehat) sebanyak 13.146 bangunan, *Town House* 23 bangunan,

Rusunami 9534 unit, Apartemen sebanyak 960 unit, kompleks Real estate sebanyak 21.895 bangunan serta berbentuk Rukan /ruko sebanyak 56.218 unit bangunan.

Rumah yang yang tidak layak huni adalah rumah yang terbuat dari bahan bekas yang dipertimbangkan tidak cocok untuk bertempat tinggal atau terletak pada areal yang diperuntukkan bukan untuk pemukiman atau di area marjinal. Sedangkan area marjinal biasanya terletak di bantaran sungai, pinggir rel kereta api (KA), dibawah jaringan listrik tegangan tinggi (SUTET) . Bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam (PP no 35 Tahun 1991 tentang sungai). Jumlah rumah tidak layak huni berdasarkan data Podes 2008 dan hasil pengecekan kelapangan ada sebanyak 10.338 unit, yang terdiri dari 4.120 bangunan di area marjinal (bantaran sungai, pinggir rel KA dan dibawah Sutet) dan di lokasi lainnya sebanyak 6218.

Keterbatasan lahan di Kota Bandung memunculkan permukiman kumuh di mana-mana. Berdasarkan data dari Keputusan Walikota Kota Bandung no 648/Kep.455-DisTaRCip/2010 mengenai Lokasi Lingkungan Perumahan Dan Daerah Kumuh bahwa, dari 1.556 RW di Kota Bandung, 186 RW di antaranya termasuk ke dalam daerah permukiman kumuh. Dari 186 RW tersebut, 6 RW masuk dalam kategori kumuh dan berada di Daerah Kecamatan Cidadap.

Kecamatan Cidadap merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kota Bandung, Banyak berdiri apartemen dan permukiman kelas atas yang membuat kesan bahwa daerah ini menjadi daerah kumuh yang dikelilingi oleh daerah kelas

atas, sehingga terjadi ketimpangan antara kaum *elite* dan kaum pinggiran, selain pembangunan apartemen dan perumahan elite yang berada di Kecamatan Cidadap akan tetapi di sekelilingnya masih terdapat permukiman-permukiman yang kurang layak untuk dihuni. Masih banyak permukiman yang kurang bersih seperti dekat tempat sampah, bantaran sungai/got, dan kepadatannya yang tak setimpal dengan kawasan *elite* yang ada di tengah-tengahnya. Melihat dari fakta yang ada di lapangan menunjukkan banyaknya ketimpangan antara pembangunan kawasan elite di sekitar kawasan kumuh membuat pekerjaan tersendiri untuk pemerintah dalam melaraskan antara bangun yang *elite* dengan kawasan di sekitar agar tak terjadi kecemburuan sosial dan peranan masyarakat pula dalam menjaga dan melestarikan lingkungan demi terbentuknya kawasan yang indah, laras, dan aman. Seperti yang telah kita ketahui bahwa laju pertumbuhan pemukiman kumuh di Kota Bandung sangat besar, sehingga perlu upaya yang signifikan untuk menaggulangnya, salah satunya melalui upaya peningkatan persepsi masyarakat kumuh dalam perbaikan lingkungan permukiman.

Dari semua penjelasan di atas melatar belakangi penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini, adapun judul dari penelitian yang penulis lakukan adalah:

“Persepsi Masyarakat Kawasan Kumuh Terhadap Upaya Perbaikan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Cidadap Kota Bandung”.

Penulis memilih judul ini karena didalamnya terdapat suatu fenomena geografi perkotaan yang menarik. Terdapat interaksi antara manusia dengan

lingkungannya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan ruang yang dipergunakan sebagai tempat tinggal.

B. Rumusan Masalah

Masalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang benar-benar terjadi. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kekumuhan kawasan kumuh di Kecamatan Cidadap?
2. Bagaimana persepsi masyarakat kawasan kumuh terhadap upaya perbaikan lingkungan permukiman di Kecamatan Cidadap Kota Bandung?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan masyarakat terhadap upaya perbaikan lingkungan permukiman di Kecamatan Cidadap Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sangat tergantung pada judul penelitian dan masalah penelitian. Tujuan dapat mengarahkan peneliti untuk mencapai sasaran dan target yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tingkat kekumuhan di Kecamatan Cidadap Kota Bandung.
2. Mengidentifikasi persepsi masyarakat kawasan kumuh tentang kualitas lingkungan yang sehat di wilayah Kecamatan Cidadap Kota Bandung.
3. Menganalisis upaya yang dilakukan masyarakat dalam upaya perbaikan lingkungan permukiman di kecamatan Cidadap Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan pengayaan dalam pembelajaran Geografi SMA Kelas XI Semester ganjil mengenai Kependudukan.
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota dan instansi terkait (RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan) dalam hal pengelolaan pemukiman kumuh.
3. Sebagai bahan masukan bagi penduduk di Kecamatan Cidadap Kota Bandung, dalam berpartisipasi masyarakat dalam menjadikan lingkungan permukiman yang sehat.
4. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pemahaman dalam penerapan konsep dan teori Geografi dengan kenyataan di lapangan.
5. Sebagai Bahan atau masukan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai kawasan kumuh.

E. Definisi Operasional

Uraian mengenai konsep-konsep yang ada pada masalah penelitian akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Persepsi

Persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari serapan, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderannya. Persepsi merupakan hal yang mempengaruhi sikap, dan sikap akan menentukan perilaku.

2. Masyarakat

Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata-cara, dari wewenang dan kerjasama antara kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah-laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah dan merupakan jalinan hubungan sosial.

3. Kawasan Kumuh

Kawasan Kumuh yaitu kawasan permukiman yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Suatu pemukiman kumuh dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari kemiskinan, karena pada umumnya di pemukiman kumuh ini masyarakat miskin tinggal dan banyak kita jumpai di kawasan perkotaan besar dan butuh penanganannya yang serius dari pemerintah agar dapat terbentuk kawasan yang indah, tentram dan asri.

4. Kualitas Lingkungan

Kualitas Lingkungan adalah kualitas bangunan perumahan dalam suatu kawasan permukiman yang dilihat dari aspek ukuran rumah, kepadatan bangunan, pola perumahan, lebar dan kondisi jalan, kualitas vegetasi dan lahan terbuka, jarak terhadap daerah industri dan sanitasi.